

# JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol. 2 No. 1

Juni 2018

Halaman 20 - 29

## Komunikasi Politik Elit NU dan Muhammadiyah dalam Pilkada Kediri

Caesar Demas Edwinarta, Rizky Dwijayanti

Universitas Airlangga, Indonesia

[rizky.dwijayanti-2016@fisip.unair.ac.id](mailto:rizky.dwijayanti-2016@fisip.unair.ac.id)

*English Title: Polical Communication between NU and Muhammadiyah's Elite during Kediri Local Election*

**Abstrak** - Penelitian ini berupaya untuk menganalisa komunikasi politik yang dijalankan oleh elit Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kediri Tahun 2013 yang lalu. Secara organisasi, baik NU maupun Muhammadiyah tidak menyatakan keterlibatannya dalam proses Pilwali Kota Kediri. Namun secara personal, pada tingkatan elit, terdapat peranan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive* yang disertai oleh triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Komunikasi politik yang dilakukan oleh NU maupun Muhammadiyah adalah komunikasi politik yang dijalankan berdasarkan atas stratifikasi Pareto yang membagi kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan untuk memerintah dan yang tidak memiliki keunggulan apapun. NU memiliki stratifikasi elit yang terdiri atas elit yang memiliki keunggulan untuk memerintah dan terepresentasi oleh para kyai serta elit yang tidak memiliki keunggulan untuk memerintah dengan digambarkan sebagai pengurus harian NU pada kepengurusan Tanfidziyah. Sedangkan mayoritas elit Muhammadiyah memiliki kapabilitas sebagai elit yang memiliki keunggulan dengan pertimbangan adanya pengaruh yang dihasilkan dari komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang terjadi merupakan representasi dari sebuah proses sirkulasi elit yang menghasilkan suatu pergeseran elit sebagai bentuk kelihaihan elit pengganti dalam menggeser kedudukan elit kuat sebelumnya melalui pergeseran nilai-nilai dengan menempatkan kelompok yang berpengaruh dalam kontestasi politik sebagai kelompok yang mampu mengalihkan kekuasaan kelompok sebelumnya.

**Kata Kunci** : Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Elit.

**Abstract** - *This research seeks to analyze the political communication run by elite Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in the election of Mayor and Vice Mayor (Pilwali) Kediri Year 2013 ago. Organizationally, neither NU nor Muhammadiyah declared its involvement in the Kediri City Pilwali process. But personally, at the elite level, there is a role performed by each of these institutions. This study was studied using descriptive qualitative method with purposive selection technique of informant accompanied by triangulation of source as technique of examination of data validity. The political communication carried out by both NU and Muhammadiyah is a political communication based on the Pareto stratification which divides the community groups that have the advantage to govern and who have no advantages whatsoever. NU has an elite stratification consisting of elites who have the*

*advantage to govern and represent by kyai and elite who have no superiority to govern by being described as NU daily administrators on the management of Tanfidziyah. While the majority of Muhammadiyah elites have the capability as an elite that has an advantage with consideration of the influence resulting from political communication conducted by the elites. The results of this study indicate that political communication that occurs is a representation of an elite circulation process that results in an elite shift as a form of elite substitute shrewdness in shifting the previous strong elite's position through shifting values by placing influential groups in political contestation as a group capable of transferring power of the previous group.*

**Keywords:** *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Elit.*

## **PENGANTAR**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Grafika, 2015:3). Pelaksanaan pilkada secara tidak langsung akan menggambarkan dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai daerah dengan tingkat heterogenitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Suatu daerah dapat memiliki keunikan dalam penyelenggaraan pilkada yang belum tentu terjadi di daerah lainnya. Banyak hal yang mendasari terjadinya heterogenitas tersebut, salah satunya adalah mengenai adanya pola struktur sosial yang berbeda-beda.

Pilkada yang diselenggarakan di tingkatan daerah merupakan sarana untuk membuka akses peningkatan kualitas demokrasi pada tataran lokal. Peningkatan kualitas yang dimaksud melingkupi pengakomodasian kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, serta membuka pengaruh bagi elit-elit politik lokal yang dapat terdiri dari elit partai, elit sosial bahkan elit keagamaan.

Dalam pelaksanaan pilkada secara langsung memang tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi. Akan tetapi, keterbukaan akses demokrasi yang semakin dinamis akan membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan politik di daerah, terutama dalam aspek pengoptimalisasian elemen-elemen politik di daerah sesuai dengan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing, termasuk adanya stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1926. Selama nyaris satu abad perjalannya, NU hampir tidak pernah terlepas dari kehidupan politik praktis, baik politik kenegaraan, kerakyatan maupun kekuasaan (Halim, 2014:3). Keterlibatan NU dalam perpolitikan di Indonesia lebih banyak dijalankan oleh ketokohan seorang aktor politik yang dalam konteks NU berada pada sosok kyai yang secara struktural kelembagaan mampu melahirkan konsepsi patron klien dalam masyarakat.

Keberadaan konsepsi patron klien dalam masyarakat menjadikan fenomena penggiringan massa yang diperuntukkan sebagai basis suara jamak terjadi terutama pada daerah yang masih menganut politik tradisional dengan mengacu pada komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik dan disertai oleh peran lembaga atau ormas sebagai wadah pendidikan politik sehingga secara tidak langsung akan mampu menggiring massa ke dalam afiliasi politik tertentu dari lembaga atau ormas tersebut.

Di sisi lain, Muhammadiyah lebih berupaya memposisikan dirinya sebagai gerakan kultural sekaligus kenegaraan dengan melalui pembinaan masyarakat dan pembentukannya sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang secara tidak langsung menjadikannya kurang representatif dalam partisipasinya pada kontestasi politik yang ada. Secara kuantitas dan konsistensi dalam berpolitik, Muhammadiyah dapat dikatakan berbeda dengan NU yang memiliki basis massa besar hingga di tingkat daerah. Muhammadiyah maupun NU secara kelembagaan memang enggan menyatakan keterlibatannya dalam kontestasi politik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit banyak peran politik yang dijalankan, terutama dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan oleh elit lembaga-lembaga tersebut, akan mampu mempengaruhi hasil pemilihan umum (pemilu) di sebuah daerah, seperti halnya yang terjadi di Kota Kediri.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri pada tahun 2013 yang lalu merupakan salah satu proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat Kota Kediri. Pelaksanaan Pilkada memiliki kecenderungan untuk menampilkan pertarungan elit politik yang khas pada masing-masing daerah dan belum tentu terdapat persamaan ciri khas tersebut antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013 dimenangkan oleh pasangan Abdullah Abubakar yang berpasangan dengan Lilik Muhibbah. Pasangan ini berhasil mengalahkan calon petahana, Samsul Ashar-Sunardi dengan keunggulan suara yang bisa dibilang cukup tipis. Kemenangan pasangan ini kemudian diiringi oleh wacana yang beredar di lingkungan masyarakat mengenai adanya peran politik Ormas NU dan Muhammadiyah yang digambarkan dengan keberadaan pengusung kedua pasangan ini.

Dukungan NU maupun Muhammadiyah memang dianggap cukup dapat memengaruhi konstituen pemilu di Kota Kediri. Maka tidak mengherankan apabila kemudian para elit politik di Kota Kediri akan berlomba-lomba untuk meraih simpati dan massa pendukung dari kedua Ormas Islam tersebut melalui komunikasi-komunikasi politik yang dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan mendongkrak perolehan suara sehingga menjadikannya sebagai modal yang berharga dalam meraih kemenangan dalam Pilwali tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori elit yang dipadukan dengan konsep komunikasi politik untuk menganalisa proses komunikasi politik elit Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013. Teori elit merupakan teori yang dicetuskan oleh seorang ilmuan politik yang berasal dari Italia, yaitu Vilfredo Pareto. Dalam kajian teori elit memandang bahwa masyarakat selalu memiliki suatu proses siklus untuk mewujudkan sebuah sirkulasi elit dengan didasarkan atas pembagian lapisan masyarakat menjadi dua bagian yaitu lapisan elit yang memerintah dan selebihnya adalah non-elit yang diperintah (Bellamy, 1990:ix).

Dalam proses sirkulasi elit yang dicetuskan oleh Pareto, ia menambahkan argumentasi bahwa diperlukan adanya residu dan derivasi pada setiap proses yang terdapat dalam sirkulasi elit. Residu dipahami sebagai faktor pendorong tindakan elit yang terdiri atas enam jenis, yaitu kombinasi, kesetiaan pada kumpulan, sosiabilitas, aktivitas, integrasi individual dan sex yang senantiasa diiringi oleh derivasi yang merupakan langkah pembenaran tindakannya terkait partisipasi masyarakat (Bottomore, 2006:60-63).

Pareto memiliki pemikiran yang pada intinya memilah masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki keunggulan dan mereka yang tidak memilikinya (Bellamy, 1990:63). Keunggulan yang dimiliki oleh suatu kelompok akan dapat memberikan pengaruh terhadap kepemilikan kekuasaan dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki keunggulan apapun. Namun terdapat perbedaan antara elit yang memiliki

keunggulan dengan yang tidak pada posisi kedudukannya atau lebih tepatnya wadah mereka berkontestasi yang memiliki strategi dan peranan tersendiri dalam usaha melegitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini dipandang perlu karena kedudukan massa selaku golongan non-elit tetap memiliki pengaruh terhadap kedudukan elit yang sewaktu-waktu dapat menciptakan kondisi yang mampu mempengaruhi legitimasi kekuasaan elit dalam masyarakat.

Elit yang dimaksudkan dalam kajian penelitian ini adalah elit politik yang memiliki peranan dalam memutuskan kebijakan yang diusulkan oleh lembaga atau ormas, termasuk NU dan Muhammadiyah. Sebagai Ormas Islam terbesar di Kota Kediri, NU dan Muhammadiyah memiliki peranan yang signifikan dalam perpolitikan di Kota Kediri. Peranan tersebut memiliki ketergantungan terhadap elit yang berkuasa karena peranan para elit ini yang terkadang dapat menentukan arah dukungan yang dimiliki oleh basis massa melalui komunikasi-komunikasi politik yang dilaksanakan sehingga kemudian dapat memengaruhi hasil pemilu yang diikuti oleh kedua ormas tersebut. Kultur yang dimiliki oleh kedua ormas tersebut akan sangat menentukan sejauh mana para elit berperan dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh NU maupun Muhammadiyah.

Adanya proses komunikasi politik yang terjadi pada tingkatan elit NU maupun Muhammadiyah menjadikan kajian penelitian ini diperdalam melalui konsepsi komunikasi politik yang merupakan sebuah proses interaksi antar aktor-aktor politik yang terlibat dalam sebuah kontestasi politik di suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Pada hakikatnya pemahaman mengenai komunikasi politik memiliki keterkaitan, dimana secara tidak langsung sesungguhnya politik meliputi komunikasi, hal tersebut bisa dijelaskan mengenai pemaknaan komunikasi pada umumnya bertujuan untuk mempengaruhi. Sedangkan politik juga memiliki cakupan didalamnya untuk mempengaruhi kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka yang digunakan untuk meneliti sikap, perasaan, maupun perilaku individu maupun kelompok dengan disertai oleh penggunaan metode alamiah. Metode alamiah mencakup pada pengumpulan data melalui suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh seseorang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif berupaya membangun penelitian yang terperinci untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian ini memiliki fokus pada kajian terhadap komunikasi politik yang dilakukan elit NU maupun Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki dua kandidat terkuat dengan status petahana menjadikan perebutan suara masyarakat Kota Kediri selaku konstituen menjadi berat dan membutuhkan peran dari ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah melalui proses komunikasi politik yang dijalankan oleh elit-elitnya.

## **DISKUSI**

### **Komunikasi Politik diantara Elit dan Massa**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kediri tahun 2013 yang lalu dapat dikatakan sebagai kontestasi pemilihan kepala daerah yang berlangsung ketat dengan persaingan dua pasangan petahana, yang masing-masing menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada periode sebelumnya dengan hanya memiliki selisih suara pada kisaran 4000 suara. Salah satu poin utama dalam persaingan ini adalah mengenai peran politik yang dijalankan oleh elemen-elemen masyarakat yang mampu memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya Pilwali ini. Hal tersebut diantaranya mengarah pada bentuk peran politik

yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah melalui upaya komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit dalam kontestasi Pilwali Kota Kediri.

NU secara organisasi memang selalu menolak untuk menyatakan dukungannya dalam politik praktis kepada salah satu pasangan yang berkompetisi pada Pilwali yang lalu. Hal ini tidak terlepas dari Khittah NU yang tercantum dalam AD/ART NU yang menyatakan bahwa NU dilarang untuk turut serta dalam politik praktis.

*“Khittah NU merupakan landasan bagi NU untuk tidak mencampuradukkan politik dalam kegiatan NU. NU dilarang untuk berpartisipasi langsung dalam politik praktis dan hanya dapat berpartisipasi dalam rangka memberikan dukungan atas dasar politik kebangsaan yang dianut oleh NU.”* (Wawancara Subakir, 2015).

Khittah NU lahir sebagai bentuk rekondisi peranan kyai, ulama serta tokoh NU untuk dapat berfokus pada pengelolaan pesantren dan kepentingan ummat yang selama sebelumnya terkesan diabaikan karena fokus para kyai, ulama dan tokoh NU tersebut terbagi kepada kepentingan partai dan politik praktis. Hal ini yang kemudian menjadikan peranan politik yang dilakukan oleh NU pasca-khittah NU adalah terbatas pada pemberian dukungan atau motivasi melalui penyelarasan politik kebangsaan NU. Politik kebangsaan merupakan proses pemberian dukungan atau motivasi kepada siapa saja selama memang calon ataupun kelompok tersebut memiliki pemikiran yang sejalan dengan politik kebangsaan NU.

Bentuk dukungan dalam bentuk penyelarasan politik kebangsaan memang bukanlah terlihat seperti peran politik yang dijalankan oleh mayoritas organisasi atau lembaga sejenisnya. Namun inilah yang dapat dikatakan sebagai salah satu peranan NU dalam Pilwali Kota Kediri tahun 2013 yang lalu terlebih lagi diperkuat dengan pernyataan Achmad Subakir selaku ketua PCNU Kota Kediri bahwa terdapat kurang lebih 7 kali rapat yang menghasilkan keputusan bahwa PCNU Kota Kediri sepakat untuk memberikan dukungan politik kebangsaannya kepada pasangan Abdullah Abubakar-Lilik Muhibbah. Pertimbangannya adalah bukan semata karena Lilik Muhibbah adalah Ketua Muslimat NU Kota Kediri, melainkan berdasarkan *track record* yang ada, kapabilitas serta kemampuan untuk menjalankan politik kebangsaan NU yang ditunjukkan oleh pasangan ini adalah yang paling sesuai dengan politik kebangsaan NU itu sendiri (Wawancara Subakir, 2015).

Peran politik NU tidak semata digambarkan oleh keputusan politik kebangsaan yang disepakati bersama oleh pengurus PCNU Kota Kediri melalui komunikasi politik yang terjalin diantara elit-elitnya, melainkan juga mencakup pada peranan yang dijalankan oleh para kyai yang dapat dikatakan memiliki kharismatik untuk menentukan arah massa yang berada di belakangnya. Kyai sebagai elemen kunci sekaligus elit utama dalam perpolitikan yang dijalankan oleh NU terpampang jelas dalam struktur organisasi NU yang menempatkan Rais Syuriah diatas pengurus Tanfidziyah yang notabene Rais Syuriah ini berisikan oleh para kyai sehingga bagaimanapun juga kyai dipandang lebih memiliki posisi yang strategis dalam menentukan kebijakan dalam organisasi NU sendiri.

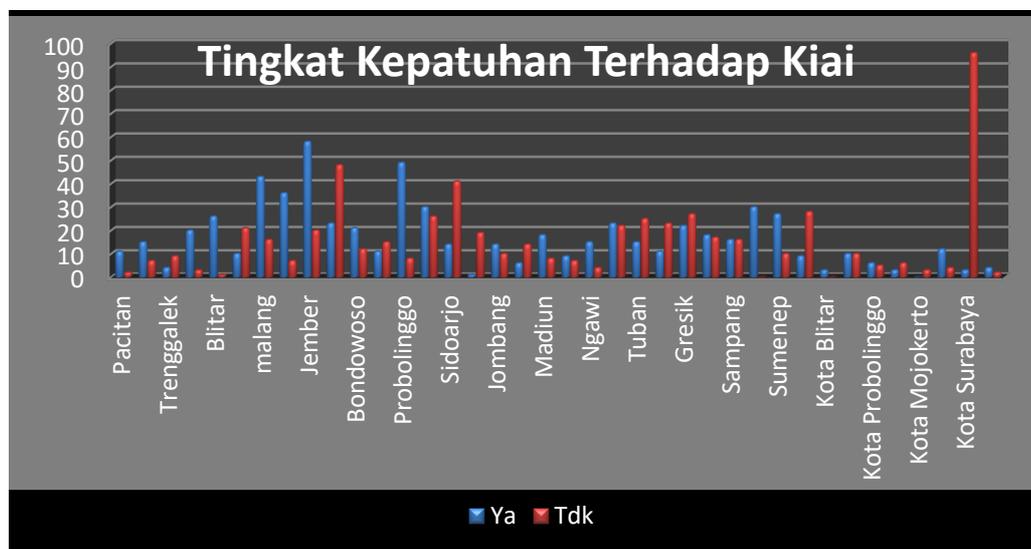
Peran yang ditunjukkan oleh elit NU secara struktural terbagi menjadi dua bagian yaitu peran yang dijalankan oleh elit formal serta peran yang dijalankan oleh elit non-formal. Peran politik yang dijalankan oleh elit formal NU adalah peran yang dijalankan oleh pengurus NU yang memiliki jabatan pada kepengurusan Tanfidziyah sebagaimana tercermin dengan partisipasinya Lilik Muhibbah selaku Ketua Muslimat NU dalam Pilwali. Sementara peran elit non-formal NU yang berpusat pada kyai yang mampu menentukan arah dukungan maupun kebijakan dalam sebuah pondok pesantren. Kyai memiliki keunggulan untuk

memerintah dalam organisasi NU karena memiliki pengaruh yang luas di dalam pesantren serta dianggap memiliki pengaruh yang kuat di dalam organisasi NU melalui keberadaan Rais Syuriah dalam organisasi NU.

### Pertarungan diantara Komunikasi Elit: Kepatuhan Terhadap Kyai

Bila mengacu pada penelitian Faza Dhora Nailufar, S.IP., M.IP., tentang politik patron klien kyai di Jawa Timur, memang terdapat kecenderungan terhadap adanya penurunan ketaatan santri terhadap kyai dalam sebuah kontestasi politik yang ada, termasuk pada yang terjadi di Kota Kediri pada saat berlangsungnya Pilwali.

**Gambar 1 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kyai Di Jawa Timur**



(Sumber : Faza Dhora Nailufar, 2015)

Penelitian tersebut memaparkan bahwa di Jawa Timur, khususnya di Kota Kediri, memiliki kecenderungan bahwa masyarakatnya memang tidak memiliki kultur patron klien yang kuat meskipun Kota Kediri dapat dikatakan sebagai salah satu mercusuar pendidikan Islam di Jawa Timur melalui keberadaan pondok pesantren besar seperti Pondok Pesantren Lirboyo di lingkungannya. Hal ini dipertegas bahwa dari keseluruhan data mengenai patron klien di Kota Kediri, hanya 25% bagian dari masyarakat Kota Kediri yang mematuhi segala bentuk patron klien yang dijalankan oleh kyai, sementara sisanya tidak mengakui terhadap adanya proses patron klien yang ada (Nailufar, 2015).

Pada pelaksanaan Pilwali Kota Kediri tahun 2013 yang lalu, pasangan Samsul Ashar-Sunardi merupakan unggulan utama dalam memenangkan Pilwali. Hal ini sekaligus menempatkan Samsul Ashar sebagai elit yang lebih superior dibandingkan dengan Abdullah Abubakar yang dapat dikatakan sama-sama merupakan petahana di Kota Kediri. Namun pada pelaksanaannya, Abdullah Abubakar dinilai lebih memiliki kelihaian politik terutama dalam upayanya meraih dukungan NU melalui strategi menggandeng Lilik Muhibbah selaku Ketua Muslimat NU.

Peluang dalam memenangkan Pilwali Kota Kediri yang lalu memang tidak hanya sekedar mengacu pada jumlah dukungan yang didapat, melainkan pada proses manajemen dukungan berkaitan dengan pecahnya dukungan NU terhadap kedua belah pihak. Pecahnya dukungan NU memang tidak tercermin dalam konflik organisasi melainkan tergambar pada partisipasi elit NU dalam pendampingan kandidat yang ada melalui elemen-elemen pendukung seperti komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses, partai politik pendukung serta kemampuan elit dalam mempengaruhi massa.

Di sisi lain, peran Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan memang terbatas apabila dikaitkan dengan politik praktis. Proses pengambilan keputusan dalam Muhammadiyah cenderung bersifat personal dengan tidak mengatasnamakan organisasi sehingga apabila terdapat elit Muhammadiyah di dalam tim pemenang salah satu pasangan calon, hal tersebut dapat terjadi atas dasar kemauan personal dan bukan dorongan dari organisasi, meskipun pada akhirnya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep elit yang dicetuskan oleh Pareto, Mosca, Lasswell maupun Spencer yang mengindikasikan adanya elit yang berpengaruh pada setiap lembaga atau organisasi.

Keberadaan elit di salah satu pihak pasangan Abdullah Abubakar-Lilik Muhibbah menjadikan dukungan Muhammadiyah dapat dikatakan mengalir kepada pasangan tersebut, mengingat dalam organisasi Muhammadiyah sendiri seperti yang telah dikatakan sebelumnya, cenderung dogmatis mengikuti pemikiran elit yang berkuasa dan berpengaruh di Muhammadiyah. Pemikiran tersebut dikarenakan oleh dasar kultural yang ada pada Muhammadiyah mendukung untuk terjadinya hal tersebut.

Kontestasi elit Muhammadiyah juga sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh Pareto mengenai poin residu dalam tindakan elit yang dipahami sebagai faktor pendorong elit untuk bertindak. Residu yang dimiliki oleh elit Muhammadiyah dalam upayanya menggiring massa merupakan penjabaran dari residu kombinasi yang merupakan kemampuan elit untuk menggunakan kapasitasnya dalam berpikir dan mengorganisir massa di bawah naungannya (Bottomore, 2006:63). Bedanya dalam posisi ini elit Muhammadiyah memiliki kapabilitas untuk memiliki keunggulan dalam memerintah organisasinya dibandingkan dengan elit yang terdapat pada NU.

Kapabilitas ini dapat menggambarkan dari kemampuan elit Muhammadiyah untuk menyolidkan basis massanya sebagai upaya untuk memenangkan pasangan calon yang diperjuangkannya meskipun upaya tersebut dilakukan dengan tanpa mengatasnamakan organisasi yang dinaunginya. Hal ini dapat terjadi sebagai bentuk sumber daya yang dimiliki oleh elit Muhammadiyah dimana sumber daya-sumber daya tersebut mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap politis kader Muhammadiyah lainnya.

Elit yang terdapat di Muhammadiyah meskipun jumlahnya minoritas tetapi memiliki keunggulan untuk memerintah dalam organisasinya, terutama melalui komunikasi politik yang dilakukan oleh elit-elit tersebut. Hal tersebut menurut Pareto merupakan kelebihan bagi mereka karena dapat mempengaruhi atau bahkan mengarahkan basis massa yang dimilikinya, terlebih kader-kader Muhammadiyah sendiri cenderung hanya memiliki afiliasi politis secara terbatas (dan terfokus) sehingga memungkinkan elit untuk dapat memberikan pengaruhnya lebih baik dibandingkan dengan elit yang terdapat pada NU. Pergerakan elit Muhammadiyah didasarkan atas konsepsi sirkulasi elit Lasswell yang mendasarkan perubahan sebagai akibat dari adanya pergeseran nilai-nilai yang menempatkan kelompok yang berpengaruh dalam kontestasi politik sebagai kelompok yang mampu mengalihkan kekuasaan kelompok sebelumnya (Bellamy, 1990:63). Adanya konsepsi ini merupakan bentuk

representasi politis yang terjadi pada Pilwali Kota Kediri yang lalu saat Walikota petahana berhasil digantikan oleh Wakil Walikotanya dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya peranan elit-elit pendukung seperti elit Muhammadiyah sendiri.

## KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam terbesar di Kota Kediri yang mempunyai konsekuensi pada setiap kebijakan yang dijalankan. Nahdlatul Ulama cenderung lebih terbuka dengan proses pengambilan keputusan namun bukan dalam bentuk politik praktis melainkan sekedar pemberian motivasi politik kebangsaan yang diupayakan melalui rapat-rapat informal yang dijalankan oleh Tanfidziyah dan Rais Syuriah dalam PCNU Kota Kediri. Sementara Muhammadiyah cenderung tertutup dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan politik praktis meskipun ada indikasi dilakukannya rapat-rapat informal antara elit-elit Muhammadiyah yang menjadi penegasan peran politik Muhammadiyah disamping peran politik personal yang dijalankan oleh para elit tersebut.

Peran elit NU dalam Pilwali Kota Kediri tahun 2013 ini secara garis besar terbagi atas dua kelompok, yaitu pertama adalah peran yang dijalankan oleh para kyai dan ulama sebagai kelompok yang memiliki keunggulan untuk memrintah serta kelompok Tanfidziyah dalam PCNU Kota Kediri yang memiliki kecenderungan tidak memiliki keunggulan untuk memerintah. Sementara peran elit Muhammadiyah dalam Pilwali ini terbatas pada peran elit-elit yang berpartisipasi langsung dalam proses Pilwali seperti tim sukses, partai politik pendukung serta elit lain yang nyaris keseluruhannya memiliki keunggulan untuk memerintah organisasi yang dipimpinnya. Dalam Pilwali ini terdapat sirkulasi elit yang didasarkan atas konsep Pareto dan Laswell bahwa elit yang kuat (dalam hal ini Samsul Ashar) akan mampu tergantikan kedudukannya oleh elit yang cermat dalam melihat dan memanfaatkan peluang yang ada (digambarkan sebagai Abdullah Abubakar) sebagai akibat dari adanya pergeseran nilai-nilai yang menempatkan kelompok yang berpengaruh dalam kontestasi politik sebagai kelompok yang mampu mengalihkan kekuasaan kelompok sebelumnya.

Proses pendampingan kandidat yang dilakukan oleh NU Kota Kediri tergambar pada partisipasi Lilik Muhibbah yang merepresentasikan peran PCNU Kota Kediri di Pilwali ini. Namun Samsul Ashar juga menampilkan restu yang diberikan oleh (alm.) K.H. Idris Marzuki yang secara kapabilitas, (alm.) K.H. Idris Marzuki merupakan elit yang memiliki keunggulan dalam memerintah dengan kapabilitasnya masing-masing, dibandingkan dengan Lilik Muhibbah maupun PCNU Kota Kediri yang tidak memiliki keunggulan dalam memerintah organisasi yang berkaitan dengan proses penggiringan basis massa yang ada. Sedangkan bagi Muhammadiyah, pendampingan yang dilakukan secara nyata diperlihatkan oleh Abdul Bagi yang merupakan sekretaris DPD PAN Kota Kediri dengan menjadi elit yang memiliki keunggulan untuk memerintah dalam Pilwali ini sehingga mampu memenangkan pasangan Abdullah Abubakar-Lilik Muhibbah menjadi pasangan yang terpilih untuk menjadi Walikota-Wakil Walikota Kediri periode 2013-2018, meskipun kemenangan yang ada tidak murni sebagai hasil pertarungan politik yang *fair* mengingat adanya faktor *money politics* yang menjadikan analisa pergeseran peta politik menjadi lebih kompleks karena tidak hanya terbatas pada peranan elit yang ada.

## DAFTAR BACAAN

Abdillah, Masykuri, Prof., Dr. 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Achidsti, Safya Auliya. 2015. *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Alfabeta.
- Arifin, Ichwan. 2008. *Kyai dan Politik (Studi Kasus Perilaku Kyai dalam Konflik PKB Pasca Mukhtamar II Semarang)*. Semarang: Thesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Bellamy, Richard. 1990. *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*. Jakarta: LP3ES.
- Bottomore, Tom B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Fuad, Ahmad Nur. 2015. *Dari Reformis Hingga Transformatif : Dialektika Intelektual Keagamaan Muhammadiyah*. Malang: Intrans Publishing.
- Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2014. *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD UGM.
- Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, Faisal Dr., M.A. 1999 *NU, Gus Durisme dan Politik Kyai*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kodir, Abdul and Susilo, Daniel. (2015). *CSR dan PR: Sinergitas, Kritik, dan Diskursus Budaya Komunikasi Tanggung Jawab Perusahaan*. Surabaya: CV. M- Brothers Indonesia.
- Lasswell, Harold D. & Abraham Kaplan. 1950. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat : Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi, Ahmad. 2014. *Peran Nahdlatul Ulama dalam Pembentukan Ideologi Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., Prof., Dr., M.A. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Mosca, Gaetano. 1939. *The Ruling Class*. New York: Mc-Graw-Hill Book Company.
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta: IDW.

- Parawansa, Khofifah Indar. 2015. *NU, Perempuan Indonesia : Sudut Pandang Islam Tradisional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Priyono, Herry B. 2000. *Sebuah Terobosan Teoritis*. Jakarta: Basis.
- Redaksi Sinar Grafika. 2015. *Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota (UU RI No. 8 Tahun 2015)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Scruton, Roger. 2007. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaedy, Ahmad & Hermawan Sulistyono. 2000. *Kyai & Demokrasi : Sebuah Potret Pandangan tentang Pluralisme, Toleransi, Persamaan, Negara, Pemilu dan Partai Politik*. Jakarta: P3M-The Asia Foundation.
- Suharizal, Dr. S.H., M.H. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Susilo, D., & Kodir, A. (2016). Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan. *Jurnal Politik*, 1(2), 317-330.
- Suwarno, Drs., M.Si. & Asep Daud Kosasih, S.Pd., M.Ag. 2014. *Relasi Agama dan Negara dalam Skala Lokal : Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaifulloh. 2015. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turmudi, Endang, Dr. 2004. *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Ubaid, Abdullah & Mohammad Bakir (ed.). 2015. *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ulum, Amirul. 2015. *Muassis Nahdlatul Ulama : Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Usman, Nurhamin Nahar, Dr., H., M.H. 2015. *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahab, Solichin Abdul, Prof., Dr. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.